

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BALAI HARAPAN KEAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Oleh:

DIAN AYU PRATIWI^{1*}

NIM. E1011141013

Sukamto ^{2*}, Hairil Anwar ^{2*}

*Email: e1011141013@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor belum efektifnya implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Edward III (dalam Winarno, 2014) yang mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel, yaitu 1). Komunikasi, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Balai Harapan tidak berjalan dengan baik. 2). Sumber Daya, baik dalam dimensi sumber daya manusia, dana dan fasilitas yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan BPNT masih kurang maksimal dilakukan. 3). Disposisi, pelaksana program menunjukkan kurangnya pengetahuan program yang mengakibatkan pelaksana memiliki kecenderungan sikap acuh tak acuh dalam pelaksanaan kebijakan. 4). Struktur Birokrasi, pelaksana sudah menjalankan tugasnya, namun secara prosedur masih kurang memahami. Saran yang diberikan peneliti adalah implementor BPNT di Desa Balai Harapan harus menguasai wawasan dan edukasi terkait program BPNT, memahami alur program BPNT. Bersikap lebih ramah dan peduli terhadap penerima manfaat program, agar terjalin hubungan baik. Dalam pelaksanaan diharapkan implementor BPNT Desa lebih menerapkan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: BPNT, Implementasi, Kebijakan

ABSTRACT

This study aims to reveal the factors that caused the ineffectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Balai Harapan Village. This study used a descriptive method with a qualitative approach. The theory used in this research is the theory of Edward III (in Winarno, 2014) which suggests that the success of policy implementation is determined by four variables, namely 1) Communication: communication that occurred in the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Balai Harapan Village did not work properly. 2) Resources: in terms of human resources, funds and facilities that affect the successful implementation of BPNT, they were still not optimally implemented. 3). Disposition: program implementers showed a lack of program knowledge which caused the implementers to have a tendency to be indifferent in implementing the policy. 4). Bureaucratic structure: the implementers have carried out their duties, but still did not understand the procedures. The recommendations from this research are, among others, that BPNT implementers in Balai Harapan Village must have insight and education related to the BPNT program, understand the flow of the BPNT program; be more friendly and caring towards program beneficiaries so that good relations can be established. In the implementation, it is expected that the Village BPNT implementers will apply the applicable Standard Operating Procedure properly.

Keywords: BPNT (Non-Cash Food Assistance), Implementation, Policy

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan, terutama dalam kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang berpenduduk 237 juta penduduk masih terlampaui banyak penduduk yang hidup dibawah kondisi kurang mendapat keberuntungan (miskin).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakata Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu

kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari. Sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan.

Langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia mencanangkan program Beras Miskin (Raskin), sebagai bentuk melaksanakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam memenuhi hak pangan masyarakat. Raskin merupakan program pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin

Pada tahun 2015 Program Raskin berganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera) oleh menteri sosial Khofifah Indra Parawansa. Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin, yang membedakannya hanya sebutan untuk program tersebut. Perubahan istilah nama bertujuan untuk merubah paradigma masyarakat,

yang sebelumnya program subsidi beras untuk membantu masyarakat miskin, menjadi lebih sejahtera.

Kemudian pada tahun 2018 ditransformasikan menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 Kota terpilih. Selanjutnya pada akhir tahun 2019 BPNT diseluruh Indonesia mulai dilaksanakan. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (*Cashless*) melalui penggunaan kartu elektronik atau yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan langsung kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bantuan tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat dipergunakan untuk memperoleh

beras dan atau telur di e-Waroeng sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Besaran manfaat program BPNT adalah Rp.200.000/KPM/bulan.

Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan di e-Waroeng. Adapun tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut: 1.) Mengurangi mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, 2.) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, 3.) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, 4.) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Penyaluran BPNT dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pada pasal 5 mengatakan bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi: 1.) Proses registrasi dan/atau pembukaan

rekening, 2.) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, 3.) Proses penyaluran, dan 4.) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

Kecamatan Tempunak terdapat 26 Desa yang melaksanakan program BPNT, salah satunya adalah desa Balai Harapan yang mana terpilih 43 Penerima Manfaat. Dalam pelaksanaannya Program BPNT Desa Balai Harapan terdapat implemetor yang tergabung dalam Tim Koordinasi Bansos Pangan Desa. Tim Koordinasi Bansos Pangan Desa terdiri dari penanggung jawab (Kades), ketua, sekretaris, dan beberapa bidang. Keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Desa antara lain. Tim Koordinasi Bansos Pangan Desa dibantu oleh TKSK Sekretariat Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Koordinator Statistik Desa di kecamatan dan desa/kelurahan. Adapun struktur dan keanggotaan Tim Koordinasi Bansos Pangan Desa yang menjadi

implementor Program BPNT di Desa Balai Harapan.

Berdasarkan observasi dan wawancara menunjukan bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan pemerintah. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program kepada masyarakat atau minimal penerima BPNT atau target grup.

Padahal berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pada pasal 5 dalam mekanismenya tertera poin tentang proses pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Hal serupa juga dijelaskan dalam Pedoman Umum BPNT, tentang tujuan dari edukasi dan sosialisasi BPNT, yakni 1.) Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai. 2.) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan

Pangan Non Tunai. 3.) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Hal tersebut mengakibatkan Program BPNT di Desa Balai Harapan menjadi belum efektif, karena tidak adanya edukasi dan sosialisasi terhadap KPM dapat membuat KPM tersebut menjadi kurang dan bahkan tidak memahami tujuan serta mekanisme program BPNT. Sehingga kendala yang dialami KPM seperti pada temuan peneliti yang mengira kartu KKS yang kosong saldo dibulan tertentu diartikan oleh KPM bahwa mereka bukan lagi peserta penerima BPNT. Sedangkan mereka masih terdaftar sebagai KPM BPNT. Selain itu hal tersebut akibat dari kesalahan data pada saat registrasi yang dilakukan oleh implementor BPNT di Desa Balai Harapan.

Permasalahan lain yang ditemukan yakni permasalahan mengenai komunikasi. Kurang informasi mengenai kapan uang manfaat ditransferkan oleh Bank ke KKS. Hal ini mengakibatkan KPM

ketinggalan informasi dan tidak dapat menerima bantuan tersebut. Ada KPM yang mengalami fenomena ini sepanjang periode BPNT tahun 2020. Ketidaktahuan informasi mengenai waktu *Topup* saldo dan penukaran manfaat membuat terjadinya ketidak tepatan waktu pelaksanaan sesuai Perpres RI no 63 tahun 2017 dan Pedoman Umum BPNT.

Selain itu implementor pelaksana program yakni Pemerintah Desa, Pendamping BPNT wilayah kecamatan Tempunak dan e-Waroeng keterbatasan pengetahuan program, seperti apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) dan aturan program BPNT. Sehingga fenomena lainnya yang terjadi implementor tidak mengetahui jika terdapat ketidaksinkronan data KKS KPM dengan data di KTP. Perbedaan data KKS KPM dengan data di KTP/KK KPM mengakibatkan pihak Bank tidak mentransfer uang manfaat ke kartu KKS. Sehingga KPM tidak mendapatkan manfaat Program. Hal itu berlangsung selama data di dalam kartu belum diperbaiki.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut berikut.

1. Tidak ada sosialisasi program BPNT ke pada Masyarakat atau KPM
2. Keterbatasan pengetahuan implementor mengenai program BPNT di desa Balai Harapan.
3. Ada ketidak sinkronan data KKS KPM dengan data KTP KPM.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada “Faktor yang menyebabkan belum efektifnya Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang”.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang belum efektif?”

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementrian Sosial.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat dari penerapan teori dalam dunia nyata (empirik), bagi peneliti itu sendiri atau lembaga, institusi atau masyarakat di tempat penelitian. Adapun manfaat praktis yang dimaksud dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan padaperbaikan pelaksanaan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam

peningkatan ekonomi keluarga miskin di Desa Balai Harapan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Secara etimologis, kata *policy* berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (*Greek*), yang berarti negara-kota. Istilah kebijakan (*policy*) dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Namun, istilah kebijakan (*policy*) mungkin juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Dye (dalam Agustino, 2012) yang menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Dalam definisi tersebut terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan pemerintah.

Menurut Easton (dalam Subarsono, 2013) Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian

nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sementara definisi yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Winarno, 2014) “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud tertentu yang telah ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau persoalan. Lain lagi menurut Rose (dalam Winarno, 2014) berpendapat bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Dari

hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimensi paling inti dari kebijakan publik.

Sebab sebuah kebijakan yang

baik tidak memiliki arti jika tidak dapat diimplementasikan. Dan juga implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Winarno, 2014) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu program atau kebijakan yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi:

1. Komunikasi, dalam komunikasi kebijakan, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan

(*policy implementors*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) dan aturan kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik supaya apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

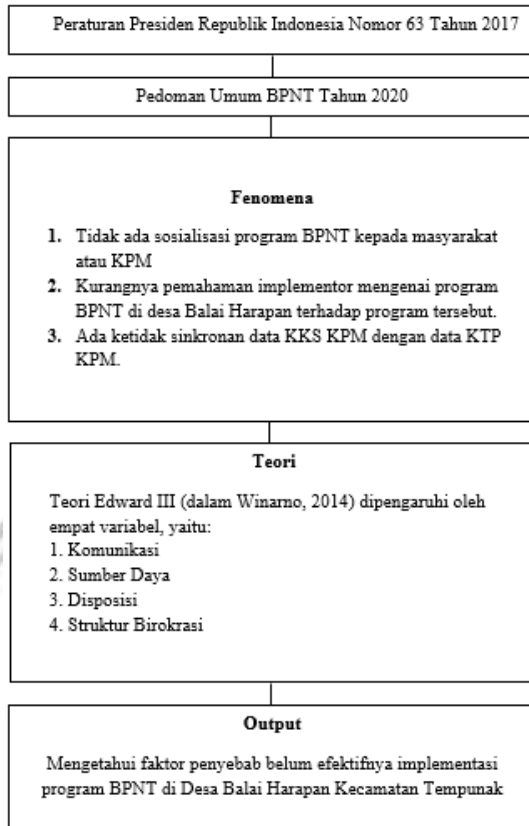
2. Sumber Daya, faktor sumber daya juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun sebuah kebijakan sudah jelas, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya sudah konsisten, serta sudah akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi, keberhasilan implementasi bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan implementor tersebut memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan, aspek ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur

organisasi pelaksana sendiri. Meskipun sumber-sumber mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

3. Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu ciri

atau karakter, dan sifat tentang fenomena tertentu.

1. Subjek Penelitian

Informan Subyek dalam penelitian ini diambil secara purposive. Ini dilakukan karena peneliti ingin mencari informasi sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapnya mengenai permasalahan dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Sehingga dapat dicari jalan keluarnya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendamping BPNT Kecamatan Tempunak
2. Kepala Desa Balai Harapan / Sekertaris Desa Balai Harapan
3. Kasi Kesejahteraan dan Operator SIKS-NG Desa Balai HARAPAN
4. Masyarakat penerima manfaat BPNT yang diambil secara acak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bantuan tersebut disalurkan kepada Adapun model implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Winarno, 2014) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat menentukan suatu program atau kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi di dalam implementasi suatu program merupakan hal yang penting. Dalam meneruskan pesan kebawah pada suatu organisasi atau ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkan atau menyebar luaskan informasi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Komunikasi yang terjadi di Desa Balai Harapan tentang implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai tidak berjalan dengan baik. Baik itu dari aspek transmisi, kejelasan informasi, dan konsisten dalam komunikasi yang terjadi pada sistem birokrasi hingga pada penerima manfaat. Selain itu, dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Balai Harapan dilapangan, implementor kurang mengetahui apa yang harus dilakukan dalam implementasi program BPNT selain menyebarkan amplop dari Dinas Sosial yang berisikan Kartu KKS peserta penerima BPNT tahun 2020.

2. Sumber Daya

Suatu kebijakan tentu saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi tidak hanya faktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan.

Pentingnya sumber daya fasilitas dalam suksesnya sebuah program tidak hanya dilihat dari adanya fasilitas yang disediakan oleh pelaksana. Namun, juga bagaimana memaksimalkan penggunaan fasilitas tersebut. Disamping itu, fasilitas dan proses pengambilan bantuan juga perlu mempertimbangkan kemungkinan yang dialami para penerima manfaat. Selain dari pada itu, pentingnya sumber daya manusia dalam mengelola sebuah program serta dana atau keuangan juga menjadi bagian dari keberhasilan sebuah program. Dalam hal ini implementasi program BPNT di Desa Balai Harapan pada variabel sumber daya dapat disimpulkan masih kurang maksimal.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang sangat penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya. Sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Artinya, disposisi akan muncul pada diri implementor apabila pemahaman terhadap program BPNT pelaksana bersikap menerima dan acuh tak acuh.

Kurangnya pengetahuan implementor mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengakibatkan implementor memiliki kecenderungan sikap acuh tak acuh. Hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan sehingga kurang pemahaman implementor terhadap esensi dari program yang dilaksanakan. Dimana dalam pelaksanaan program itu

sendiri, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada variabel komunikasi bahwa ketidakjelasan informasi yang diterima baik implementor maupun KPM mengakibatkan program tidak optimal. Hal ini mempengaruhi variabel Disposisi, yang mana perilaku dari implementor acuh tak acuh dan menyembunyikan ketidaktahuan agar tidak ada persepsi kegagalan program, yang berujung pada sikap ketidakjujuran oleh implementor.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada didalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya peneliti menemukan adanya pengurangan proses yang dilakukan oleh pelaksana, yakni dalam memperoleh data calon penerima bantuan. Dimana implementor hanya menggunakan metode observasi acak kepada masyarakat serta menggunakan data-data penerima bantuan yang sudah ada sejak sebelumnya. Sehingga, terdapat kesalahan data pada kartu KKS penerima manfaat yang tidak sama dengan data yang terdapat pada KTP Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan program BPNT di Desa Balai Harapan, yakni terdapat tujuh Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami kesalahan data pada kartu KKS (Kartu KKS KPM kosong/tidak ada saldoonya) dan membuat KPM tidak dapat merasakan manfaat bantuan program tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Komunikasi

Berdasarkan komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Balai Harapan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi di Desa Balai Harapan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurang adanya kejelasan dalam penyampaian informasi tentang program BPNT. Sehingga sering terjadi miskomunikasi dan ketidakjelasan informasi antara implementor dan KPM.

2. Sumber Daya

Sumber daya terkait implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Balai Harapan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala baik itu pada sumber daya manusia, dana, dan fasilitas. Pada sumber daya manusia masih kurang memahami tentang esensi dan orientasi dari program BPNT. Sehingga dalam penyampaian

informasi kepada KPM belum maksimal. Sedangkan pada sumber daya dana dan fasilitas terdapat kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan transportasi serta masih minimnya pengetahuan dalam memanfaatkan fasilitas.

3. Disposisi

Berdasarkan variabel Disposisi terkait implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Balai Harapan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan implementor yang mengakibatkan implementor atau pelaksana memiliki kecenderungan sikap acuh tak acuh dan ketidakjujuran.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi terkait implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Balai Harapan menunjukkan bahwa masih terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan SOP. Sehingga terdapat kesalahan yang mengakibatkan pelaksanaan program tidak efektif.

2. Saran

1. Implementor diharapkan agar lebih memahami alur dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Balai Harapan agar tidak terjadi miskomunikasi dan ketidakjelasan informasi antara implementor dan KPM.
2. Implementor diharapkan untuk memahami terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dapat lebih memanfaatkan fasilitas yang disediakan.
3. Implementor diharapkan lebih bersikap baik terhadap KPM agar terjalin hubungan baik antara implementor dengan KPM dan dapat mengetahui kendala yang ada.
4. Implementor diharapkan untuk lebih menerapkan SOP dalam melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tidak terjadi kesalahan, baik itu dari segi proses maupun pendataan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2010. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Puwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Jogjakarta : Gaya Media.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic PolicyAnalysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Media Komputindo.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode penelitian sosial*. Bandung : Refika Aditima.

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2011. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Widodo, Joko. 2010. *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta:Media Presindo.

Winarno. 2014. *Kebijakan publik Teori dan proses*. Yogyakarta:MedPress Anggota IKAPI.

Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rujukan Elektronik

Kompas.2015 .”Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra”. Diakses 2 September.<https://regional.kompas.com/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra>

Undang-Undang

UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran